



# PESADA (Perkumpulan Sada Ahmo)

Kantor Pusat: Jl. Empatlima No. 24 E Sidikalang 22212 Sumatera Utara - INDONESIA

Telp. 0627 - 23304 Fax. 0627 - 22666

e-mail: perkumpulansadaahmo@gmail.com

Perwakilan Medan: Jl. Pancur Siwah No. 1 G, Padang Bulan Km 8 Medan 20142 INDONESIA

Hp. 0813 6017 3561 e-mail: sadaahmo@yahoo.co.uk

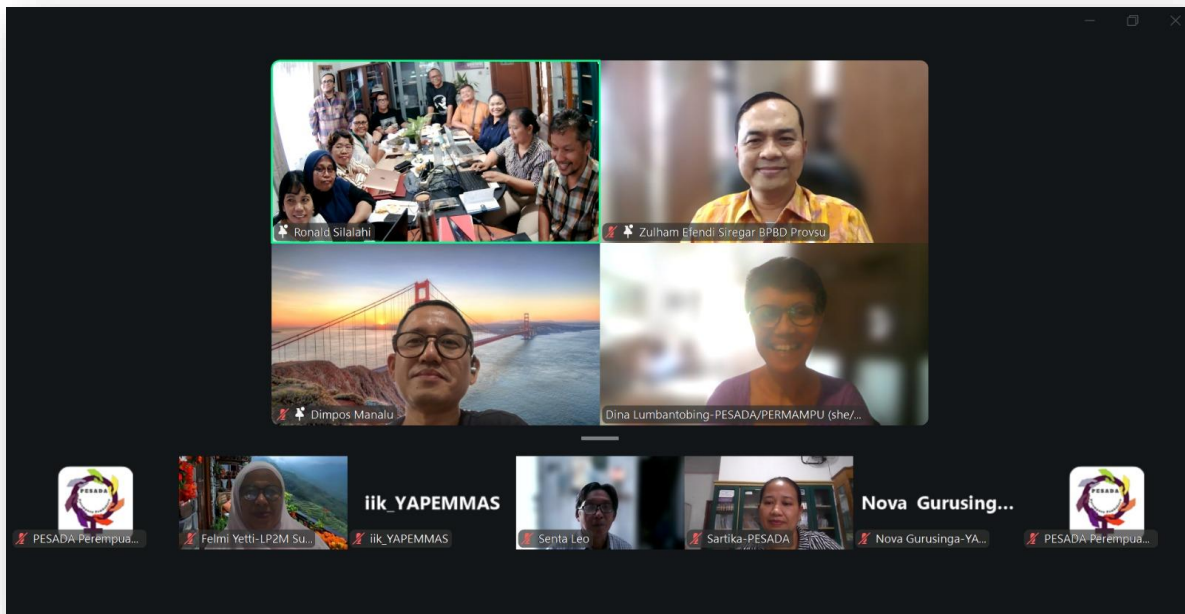
Perwakilan Nias: Jl. Baluse No. 16, Sisobahili Tabaloho, Gunungsitoli 22810, INDONESIA

Hp. 0853 6227 3731 e-mail: pesada\_nias@yahoo.co.uk

## Pernyataan Sikap PESADA & CSOs/LSM SUMUT

No: 058/C.7/K.Permampu/Pesada-Mdn/II/2026

**Wujudkan Upaya Rehabilitasi & Rekonstruksi Dampak Bencana Ekologis  
yang Resilient, Inklusif dan Berkelanjutan.**



Saat ini banyak pihak yang mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar merevisi dokumen R3P Tahun 2026-2028 yang dinilai tidak partisipatif, belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak dan lemah visi keberlanjutannya. Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan dokumen R3P Sumatera Utara pada tanggal 30 Januari 2026, dokumen yang disusun dengan sangat cepat dan menjadi R3P pertama yang masuk ke Pusat. Masyarakat Sumut mengharapkan dokumen R3P tersebut benar-benar menjadi peta jalan pemulihan yang

lebih baik. Peristiwa banjir yang terulang pada 11 Februari 2026 di Tapanuli Tengah, seperti juga banjir berulang yang terjadi di Aceh dan SUMBAR, menyadarkan kita bahwa fase “paska bencana” tidak relevan lagi. Ternyata peristiwa bencana adalah siklus yang dapat berulang dan berpotensi berdampak massif bagi kehidupan manusia apabila kita tidak serius dalam memitigasinya.

Pada tanggal 12 Februari 2026, PESADA Perempuan Pembaharu (PESADA) bersama Konsorsium PERMAMPU dengan beberapa CSOs/LSM SUMUT yang terlibat respon bencana seperti **WALHI, KKSP, YAPIDI, Yappemas, PKPA, Srikandi Lestari, Yayasan PUSAKA Nias serta dari luar SUMUT yaitu LP2M SUMBAR** sebagai anggota PERMAMPU yang terdampak bencana; melakukan kegiatan refleksi “Upaya Tanggap Darurat Bencana dan Advokasi Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi” secara hybrid. Dalam pertemuan tersebut terungkap beberapa catatan kritis terhadap dokumen R3P Sumatera Utara yang direpresentasikan oleh Bpk. Zulham Effendi Siregar, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BPBD Prov.SU dan yang dikritisi oleh Dr. Dimpos Manalu (Dosen Universitas Nommensen & Aktivistis Lingkungan) serta seluruh peserta, yaitu:

- **Dokumen R3P Sumut hanya memperhitungkan bahwa penyebab terjadinya banjir dan longsor karena curah hujan yang tinggi akibat Siklon Senyar.** Ini mengabaikan konteks bahwa kerusakan ekosistem hutan dan alih fungsi lahan secara tak terkendali menjadi daya rusak dashyat. Oleh karenanya, rencana R3P yang diperkirakan membutuhkan biaya Rp. 30 triliun lebih ini jangan sampai hanya menjadi “pengulangan resiko bencana.” Namun hendaknya mencerminkan prinsip dasar membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman (*Build Back Better and Safer*) serta berbasis pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*).
- **Proses penyusunan dokumen R3P Sumut sangat minim dalam membuka ruang partisipasi publik yang bermakna** khususnya perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat baik di tingkat desa, kab./kota dan provinsi. Suara kelompok marginal perlu didengarkan dan dimasukkan ke dalam R3P.
- **Kegiatan yang dituangkan R3P sarat dengan pembangunan fisik, infrastruktur, perkantoran tetapi sangat minim dengan kegiatan pembangunan manusianya.** Tidak terlihat pengarusutamaan gender, penyusunan dengan data terpilah: *data by gender, umur, abilitas/disabilitas, dan agama/etnis* — termasuk kebutuhan aksesibilitas, layanan kesehatan seksual & reproduksi, dukungan psikososial, dan

perlindungan dari kekerasan berbasis gender. **Kita perlu peka akan betapa besar dampak tidak kelihatan dari bencana ke rumah tangga dan keluarga, antara lain beban psikologis, beban kerja domestik dan perawatan suami seperti kasus bunuh diri Ibu berumur 40an di Sigiring-giring baru-baru ini.**

Peserta diskusi tidak menolak R3P Provinsi Sumatera Utara 2026-2028. Justru sangat mengharapkannya, tetapi harus yang benar-benar dokumen R3P yang partisipatif, berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak yang inklusif dan berkelanjutan.

Maka kami mewakili NGOs/CSOs SUMUT dan 1 NGO dari SUMBAR (LP2M) yang terlibat respon bencana dan hadir dalam diskusi di atas, meminta kepada Pemerintah:

1. **Agar merevisi dokumen R3P** dan membuka ruang partisipasi publik yang bermakna khususnya mendengar aspirasi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat.
2. **Melakukan pemutakhiran data terpilah secara sistematis: *data by gender, umur, abilitas/disabilitas, agama dan aspek social lainnya***; termasuk mengakomodir kebutuhan aksesibilitas, layanan kesehatan ketubuhan & reproduksi, pemulihan mata pencaharian masyarakat, dukungan psikososial, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender dan identitas marginal lainnya.
3. **Mengintegrasikan prinsip *Build Back Better (3Bs)* dan berbasis mitigasi/pengurangan risiko bencana yang menekankan pembangunan manusia** khususnya kelompok marginal serta restorasi ekosistem sumberdaya alam.

Posisi pulau Sumatera khususnya Sumatera Utara yang rentan dengan bencana ekologis membutuhkan kolaborasi yang kuat antara NGOs/CSOs dan Pemerintah yang responsif bahkan proaktif untuk melindungi warganya dari risiko bencana berulang untuk resiliensi seluruh warga secara inklusif dan berkelanjutan.

Medan, 14 Februari 2026

**Sartika Sianipar**

Direktur Eksekutif PESADA

CP: - Ronald Silalahi 081362348153

- Dina Lumbantobing 082164666615